



PENGARUH SISTEM MULTI DIPA TERHADAP ANGGARAN BELANJA OPERASIONAL SATUAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA

THE EFFECT OF THE MULTI DIPA SYSTEM ON THE MINISTRY OF RELIGION WORK UNIT OPERATIONAL EXPENDITURE BUDGET

I Nengah Sukadana*

Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Hindu

*Penulis Korespondensi:
nengah.sukadana1977@gmail.com

Disubmit: 22 September 2022

Revisi: 18 Oktober 2022

Terbit: 30 November 2022

Abstract

The Ministry of Religion Affairs has 3,000 Work Unit Offices and managing 5,666 DIPA (budget implementation list), it is known that the budget allocation for office operations and maintenance (002) of the Ministry of Religion is quite large. The Multi DIPA system currently used in Regional Office Work Units and Regency/City Offices makes the budget allocation for work unit operational fees (521115) large, reaching 12.1% of the operational expenditure ceiling (002). This study aims to determine the effect of the Multi DIPA System on the amount of the work unit operating fee budget at the Provincial and Regency/City Ministry of Religion Offices. With the method of implementing the One DIPA system scheme at the Ministry of Religion at the Regional and Regency/City levels, it can be seen that the current Multi DIPA system makes the operational expenditure budget of work units inefficient not in accordance with the principle of performance-based budgeting which emphasizes the concept of Value for money based on three main elements, namely economy, efficiency, and effectiveness.

Keywords: Unit Work, Multi-DIPA, Operational Expenditure

Abstrak

Kementerian Agama memiliki Kantor Satuan Kerja sebanyak 3,000 unit dan mengelola DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebanyak 5,666 DIPA, diketahui alokasi anggaran untuk operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) Kementerian Agama cukup besar. Sistem Multi DIPA yang digunakan saat ini pada Satuan Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Kabupaten/Kota membuat alokasi anggaran untuk honor operasional satuan kerja (521115) menjadi besar mencapai 12,1% dari pagu belanja operasional (002). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Multi DIPA terhadap besarnya anggaran belanja honor operasional satuan kerja pada Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan metode penerapan skema sistem Satu DIPA pada Kantor Kementerian Agama tingkat Wilayah dan Kabupaten/Kota dapat diketahui Sistem Multi DIPA saat ini membuat anggaran belanja operasional satuan kerja tidak efisien tidak sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja yang menekankan konsep *Value for Money* berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Kata Kunci : Satuan Kerja, Multi DIPA, Belanja Operasional

PENDAHULUAN

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam struktur anggaran mempunyai satker dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang paling banyak dibandingkan Kementerian/Lembaga lain di Indonesia, jumlah Satker Kantor Kementerian Agama dari pusat sampai daerah pada tahun 2021 ada sebanyak 3,000 satker dan satker-satker tersebut mempunyai DIPA sebanyak 5.666 DIPA. Kementerian Keuangan. (2022, Mei 20).

Tabel 1. Jumlah Satker dan DIPA pada Kementerian agama Tahun 2021

No	Satker	Jumlah Satker	Jumlah DIPA
1	Pusat	11	11
2	Kantor Wilayah Kemenag Povinsi	34	270
3	Kantor Kemenag Kabupaten/Kota	514	2,944
4	PTKN	77	57
5	Madrasah	2,334	2,334
6	Sekretariat Baznas	1	1
7	Unit Pencetakan Al-Qur'an	1	1
8	Asrama Haji	9	9
9	Atase Haji	1	1
10	Balai Diklat	17	17
11	LPMA (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran)	1	1
Total		3,000	5,666

Dari data di atas dapat diketahui apabila jumlah DIPA dibagi dengan jumlah satker terlihat setiap Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota rata-rata memiliki 6-8 DIPA. Jumlah Satker Kantor Kementerian Agama Provinsi sebanyak 34 memiliki total DIPA sebanyak 270 DIPA dan Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebanyak 514 mempunyai DIPA sebanyak 2,944 DIPA. Jumlah DIPA di atas apabila dirinci dalam unit eselon1 maka unit satker yang paling banyak DIPAnya adalah Ditjen Pendidikan Islam sebanyak 2,930 satker.

Tabel 2. Jumlah DIPA Satker Kementerian Agama Tahun 2021 berdasarkan Eselon 1

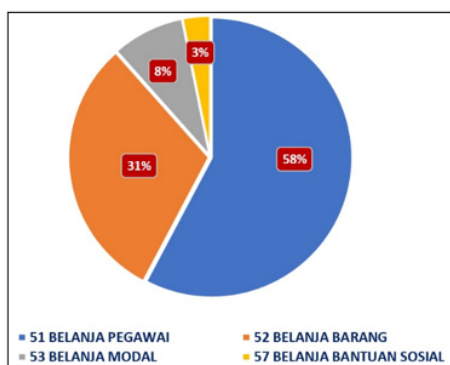
Kode	Unit Eselon 1	Jumlah DIPA
025.01	Sekretariat Jenderal	549
025.02	Inspektorat Jenderal	1
025.03	Ditjen Bimas Islam	545
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	2,930
025.05	Ditjen Bimas Kristen	359
025.06	Ditjen Bimas Katolik	347
025.07	Ditjen Bimas Hindu	186
025.08	Ditjen Bimas Buddha	180
025.09	Ditjen PHU	549
025.11	Badan Litbang Diklat	19
025.12	BPJPH	1
Total		5,666

Alokasi Anggaran Kementerian Agama setiap tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan ditengah kebutuhan anggaran yang semakin meningkat. Terdapat kebutuhan-kebutuhan anggaran prioritas yang setiap tahun pasti naik signifikan seperti anggaran pendidikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Katur Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, penambahan/perbaikan ruang kelas, Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP), BOPTN dan kegiatan prioritas pendidikan lainnya. di fungsi agama anggaran setiap tahun selalu mengalami penghematan maka perlu penambahan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendasar seperti penyediaan rumah ibadah dan sarana serta prasarana peribatan disamping itu Program Moderasi Beragama yang merupakan Program Prioritas Menteri Agama perlu mendapatkan tambahan anggaran agar bisa menjangkau masyarakat umum untuk membentuk Masyarakat Indonesia yang rukun dan toleran.

Anggaran besar lainnya yang selalu menjadi masalah setiap tahun adalah belanja pegawai, setiap tahun yang membuat penambahan belanja pegawai membengkak

adalah anggaran Tunjangan Profesi Guru karena setiap tahun Kementerian Agama meluluskan sertifikasi Guru Agama walaupun guru tersebut berasal bukan dari Kementerian Agama yang sangat sulit sekali terdeteksi jumlahnya, jika mereka sudah memiliki sertifikasi dan memenuhi persyaratan lainnya mereka berhak secara regulasi untuk dibayarkan tunjangan.

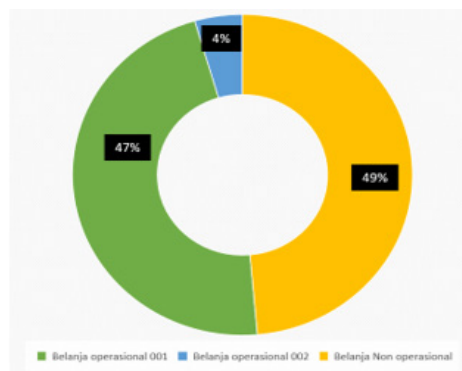
Alokasi Anggaran Kementerian Agama sebagian besar merupakan belanja pegawai (51) yaitu sebesar Rp. 39,784,768,890,000 atau 57,73% dari total pagu kementerian agama sebesar Rp. 68,920,514,797,000, kemudian terbesar kedua belanja barang (52) sebesar Rp. 21,187,379,977,000 atau 30,74%, ketiga belanja modal (53) sebesar Rp. 5,761,796,980,000 atau 8,36% dan yang terendah belanja bantuan Sosial (57) sebesar Rp. 2,186,568,950,000 atau 3,17%.



Gambar 1. Anggaran Kementerian Agama berdasarkan jenis belanja

Dari jenis belanja pengeluaran belanja operasional untuk layanan perkantoran jumlahnya paling besar yaitu sebesar Rp. 35,435,467,615,000 atau 51,41% dari total pagu Kementerian Agama dan anggaran non operasional hanya sebesar Rp. 33,485,047,182,000 atau 48,59%. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai (001) sebesar Rp. 32,307,663,005,210 (91,17%) dan belanja operasional dan

pemeliharaan perkantoran (002) sebesar Rp. 3,127,804,609,790 (8,83%).



Gambar 2. Anggaran Kementerian Agama berdasarkan jenis belanjaPengeluaran

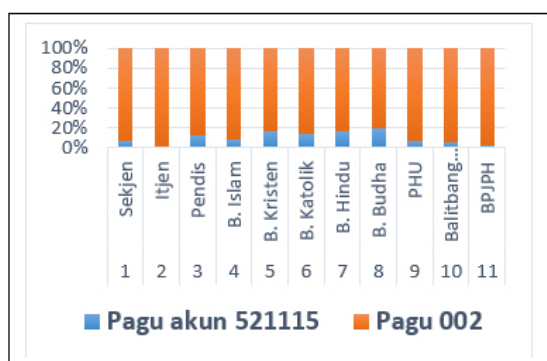
Kebutuhan alokasi anggaran untuk belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran setiap tahun semakin meningkat yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain karena bertambahnya struktur baru, penambahan biaya pemeliharaan gedung baru baik untuk kantor maupun prasarana pendidikan. Penambahan kebutuhan anggaran operasional juga disebabkan oleh kenaikan unit cost dari honor-honor pengelola keuangan dan pejabat perbendaharaan pada satuan kerja baik pusat maupun daerah. penambahan kebutuhan anggaran operasional tersebut tidak seiring dengan alokasi anggaran yang diterima setiap tahun, kebijakan penganggaran untuk operasional perkantoran adalah cenderung plat atau sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran operasional dan pemeliharaan perkantoran yang cukup besar jumlahnya adalah anggaran belanja honor operasional satuan kerja (521115), belanja tersebut terdiri dari honorarium pejabat pengelola keuangan dan perbendaharaan seperti honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat

Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (BPABP), Operator SAI, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dan honor-honor sejenis lainnya. Pada Tahun 2021 belanja honor operasional satuan kerja (521115) berjumlah sebesar Rp. 379,779,553,000 atau 12,1% dari total belanja operasional(002) Kementerian Agama yang berjumlah Rp. 3,127,804,609,790.

Tabel 3. Perbandingan Pagu belanja operasional (002) dan Pagu Akun 521115 Kementerian Agama Tahun 2021 berdasarkan Eselon 1

No	Satker/ Unit	Pagu 002	Pagu akun 521115	%
1	Sekjen	593,260,408,000	44,482,626,000	7.5%
2	Itjen	14,971,602,000	136,800,000	0.91%
3	Pendis	1,532,459,152,050	232,015,296,000	15.1%
4	B. Islam	365,084,877,000	33,214,544,000	9.1%
5	B. Kristen	76,849,390,740	15,776,693,000	20.5%
6	B. Katolik	59,441,574,000	9,394,425,000	15.8%
7	B. Hindu	42,372,789,000	8,344,153,000	19.7%
8	B. Budha	28,528,147,000	6,929,997,000	24.3%
9	PHU	336,461,295,000	25,135,457,000	7.5%
10	Balitbang diklat	62,476,923,000	3,980,682,000	6.37%
11	BPJPH	15,898,452,000	368,880,000	2.32%
	Total	3,127,804,609,790	379,779,553,000	12.1%



Gambar 3. Anggarannya belanja Operasional (002) dan belanja honor operasional satker (521115) Kementerian Agama berdasarkan unit eselon 1

Belanja honor operasional satuan kerja ini cukup besar dikarenakan Kementerian Agama pada Satker Kantor Wilayah/

Provinsi dan Kabupaten/Kota memakai sistem Multi DIPA, di mana dalam satu Satker Wilayah atau Kabupaten/Kota terdapat banyak DIPA sesuai dengan unit eselon 1 masing-masing. Setiap DIPA mempunyai nama satker yang sama namun memiliki kode satker yang berbeda-beda.

Menurut Adha. K (2018):

Nilai biaya operasional yang tinggi dan bervariasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama disebabkan karena konsep biaya operasional yang tidak sejalan dengan teori. Berdasarkan teori, biaya operasional dianalogikan sebagai administrative and general expense, yaitu seperangkat biaya yang diperlukan untuk mengelola bisnis, dan yang tidak terkait dengan produksi atau penjualan barang atau jasa.

Setiap DIPA mengalokasikan anggaran belanja honor operasional satuan kerja (521115) hal inilah yang perlu pemahaman bersama apakah pengalokasiannya sudah memakai prinsip penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien.

Menurut Mahmudi (2019):

Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Konsep efisiensi hampir sama dengan produktivitas suatu organisasi program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Efisiensi berarti pembelanjaan anggaran secara cermat (*spending well*).

Trisugiarto (2016:22) Menyebutkan bahwa:

Penyusunan anggaran mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan. Karena dengan sistem penganggaran yang sesuai dan tepat maka visi dan misi yang ditargetkan bisa dicapai. Sistem penganggaran yang berorientasi pada kinerja bisa dan dapat diterapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang ditetapkan dan berpengaruh terhadap kinerja dan Penilaian kinerja didasarkan pada perbandingan dana yang dianggarkan dan realisasi pengunannya serta capaian output. Sehingga Terdapat perbedaan keterkaitan antara dokumen perencanaan (renstra) dan dokumen penganggaran.

Menurut Mardiasmo (2018):

Dalam mendapatkan tujuan serta sasaran pelayanan publik, suatu anggaran disusun dengan pendekatan kinerja guna menanggulangi bermacam kelemahan yang ada dalam anggaran tradisional, paling utama kelemahan yang diakibatkan oleh tidak terdapatnya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Penganggaran berbasis kinerja menyalurkan kekuatan sumber daya tidak hanya ke unit organisasi tetapi juga ke program dan menggunakan pengukuran keluaran sebagai indikator kinerja organisasi. Dalam penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan tiap pendanaan yang dituangkan dalam aktivitas dengan keluaran serta hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam menggapai keluaran tersebut dengan memakai tata cara penganggaran berbasis kinerja. Oleh sebab itu, dengan terdapatnya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Sistem Multi DIPA pada dasarnya digunakan untuk memudahkan dalam pelaksanaan anggaran di Kementerian Agama, seperti kita ketahui Kementerian Agama merupakan salah satu Kementerian/

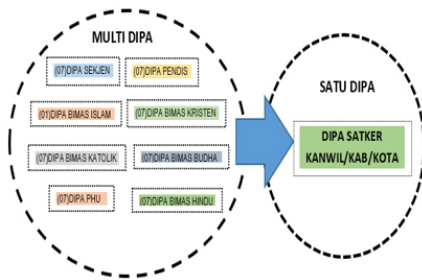
Lembaga yang memiliki anggaran terbesar dari seluruh Kementerian/Lembaga. Maka anggaran dibagi-bagi berdasarkan tugas dan fungsi dari satker pusat sampai dengan satker daerah, maka munculah banyak DIPA pada satker-satker di daerah. Hal ini perlu dilakukan perubahan agar sistem perencanaan dan penganggaran pada Kementerian Agama menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu alternatif solusi adalah memakai sistem Satu DIPA / single DIPA dalam satu Satker.

Penulis berpendapat bahwa masalah tidak efisiensinya alokasi anggaran belanja operasional satuan kerja pada Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk honor pejabat pengelola keuangan dan perbendaharaan disebabkan oleh Sistem Multi DIPA yang pakai saat ini.

Di dalam penelitian ini penulis bermaksud menganalisis hubungan antara Sistem Multi DIPA pada Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota kaitannya dengan efisiensi alokasi anggaran belanja honor operasional satuan kerja. Selain itu, tulisan ini memberikan beberapa alternatif jawaban yang dapat diimplementasikan pada Sistem DIPA Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah Sistem Multi DIPA saat ini akan di dibandingkan dengan Sistem Satu DIPA/ Single DIPA dalam pengalokasian anggaran Belanja Honor Operasional Satuan Kerja.



Gambar 4. Kerangka berpikir perubahan sistem Multi DIPA menjadi Satu DIPA.

METODOLOGI

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Menurut Sugiono (2019) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data diperoleh dari para perencana di satker Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten serta data bersumber dari sistem aplikasi Satudja Kementerian Keuangan. Penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam tulisan ini mengenai Sistem Multi DIPA pada Satuan Kerja Kementerian Agama serta masalah-masalah yang ditemukan dan alternatif pemecahan masalah sebagai solusi kebijakan dimasa depan dalam rangka tercipta penyelenggaraan tugas pemerintah yang efektif dan efisien.

Objek Penelitian

Penelitian ini memfokuskan objek penelitian pada anggaran belanja operasional khususnya anggaran belanja honor operasional satuan kerja (akun 52115) pada Sistem Multi DIPA Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sumber Data

1. Data dari informan para Perencana Satuan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota, sampling dilakukan pada Satker Provinsi Bali yang terdiri dari 10 satker yang memiliki 75 DIPA satker. Data diperoleh dengan mengirimkan matrik untuk diisi oleh Perencana Satker.
2. Data dari Aplikasi Satu DJA dan Sakti Kementerian Keuangan tingkat unit. Data diperoleh dengan login kedalam aplikasi satu DJA dan Sakti untuk mencari data pagu alokasi anggaran tahun 2021, data belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) serta data belanja honor operasional satuan kerja dengan akun 52115.

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada data-data yang telah ditetapkan menjadi objek dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Sistem Multi DIPA dan besarnya anggaran belanja operasional satuan kerja pada Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Data yang diolah memakai sample satu dari Kanwil Kemenag Provinsi Bali sebagai perwakilan Satker

Kanwil yang berjumlah 34 satker dan Kantor Kemenag Kabupaten Buleleng sebagai perwakilan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota yang berjumlah 514 satker. Dari kedua satker tersebut kemudian anggaran belanja operasional satuan kerja diskemakan dengan Sistem Satu DIPA/ Single DIPA maka alokasi untuk honor operasional satuan kerjanya akan mengalami perubahan sesuai hipotesis awal akan mengalami penghematan. Skema sistem satu DIPA yang pakai ada 2 jenis, yaitu:

1. Skema-1 dengan menjadikan jumlah KPA, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji diasumsikan hanya masing-masing satu orang dan honor lainnya masih sama dengan skema multi DIPA.
2. Skema-2 lebih *extrime* untuk penghematan, yaitu jumlah KPA, PPSPM, Bendahara, Bendahara Gaji berjumlah masing-masing satu orang. PPK berjumlah dua orang, staff PPK dua kali jumlah PPK, yaitu empat orang dan Tim SAI berjumlah empat orang dan yang lainnya masih sama sebanyak delapan orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem DIPA pada satker Kantor Kementerian Agama tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota memakai sistem multi DIPA, di mana dalam satu satker terdapat banyak DIPA yang mewakili unit eselon 1, di dalam satker Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdapat DIPA Sekretariat Jendral, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Budha, dan Ditjen PHU.

Penulis memakai sample penelitian secara kuantitatif pada Satker Kantor Kementerian Agama di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali.

Kantor Wilayah Kemenag Prov. Bali

Di mana pada Satker Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bali terdapat 8 DIPA, yaitu: (1) 419850 Sekretariat Jendral, (2) 419851 Ditjen Bimas Islam, (3) 419852 Ditjen Pendidikan Islam, (4) 419853 Ditjen Bimas Kristen, (5) 419854 Ditjen Bimas Katolik, (6) 419855 Ditjen Bimas Hindu, (7) 419856 Ditjen Bimas Budha dan (8) 419857 Ditjen PHU. Didalam masing-masing DIPA terdapat alokasi anggaran belanja honor operasional satuan kerja (521115) sebesar Rp. 685,974,000 pada Tahun 2021 dan tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp. 701.352.000, secara Rinci berdasarkan DIPA dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Anggaran Belanja Operasional Satuan Kerja Pada Kantor Wilayah Kemenag Prov. Bali

No	Satker/Unit	2021	2022
1	Sekjen	138,000,000	138,000,000
2	Pendis	115,200,000	115,200,000
3	B. Islam	58,200,000	70,080,000
4	B. Kristen	62,080,000	60,840,000
5	B. Katolik	73,054,000	52,056,000
6	B. Hindu	91,680,000	91,680,000
7	B. Budha	71,880,000	91,680,000
8	PHU	75,880,000	81,816,000
Total		685,974,000	701,352,000

Besarnya Alokasi anggaran untuk belanja operasional satuan kerja tersebut apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) pada kantor Kementerian Agama Provinsi Bali sudah mencapai 12,7% dari total anggaran, yaitu total anggaran 002 sebesar Rp. 6,460,949,192 dan Anggaran operasional satuan kerja sebesar Rp. 819,834,000.

Tabel 6. Perbandingan Pagu belanja Operasional (002) dengan Belanja Honor Operasional Satuan Kerja pada Tahun 2021 (akun 521115) Tahun 2021

No	Satker/Unit	2021	2022	%
1	Sekjen	138,000,000	138,000,000	6.5%
2	Pendis	115,200,000	115,200,000	14.8%
3	B. Islam	58,200,000	70,080,000	28.1%
4	B. Kristen	62,080,000	60,840,000	18.0%
5	B. Katolik	73,054,000	52,056,000	20.3%
6	B. Hindu	91,680,000	91,680,000	13.2%
7	B. Budha	71,880,000	91,680,000	20.5%
8	PHU	75,880,000	81,816,000	18.3%
Total		685,974,000	701,352,000	12.7%

Penelitian kemudian dilanjutkan dengan telaah data per unit eselon 1 pada satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, ditemukan data hampir seluruh DIPA unit Satker Kanwil Prov. Bali menganggarkan honorarium untuk KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staff PPK/ Pengelola dan Tim SAI. Data alokasi anggaran masing-masing DIPA dan data rincian anggaran belanja operasional satuan kerja (521115) tiap unit eselon1 pada satuan kerja Kanwil Kemenag Prov. Bali Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel. 7

Tabel 7. Alokasi Anggaran Unit Eselon1 dan Anggaran Belanja Operasional Satuan Kerja (521115) Kanwi Kemenag Prov. Bali Tahun 2021

No	Unit/Pagu DIPA/Jenis Honor	Vol	Jumlah
1.	4198520 Sekretariat Jenderal		
a.	Pagu DIPA		12,204,888,000
b.	Pagu 521115:		165,000,000
	[-] KPA	1	36,120,000
	[-] PPK	2	35,040,000
	[-] PPSPM	1	15,000,000
	[-] Bendahara	1	13,080,000
	[-] Bendahara Gaji	1	3,600,000
	[-] Staff PPK	2	29,160,000
	[-] Tim SAI	1	6,000,000
	[-] Lainnya	2	27,000,000
2.	419852 Ditjen Pendidikan Islam		
a.	Pagu DIPA		17,063,924,000
b.	Pagu 521115:		136,920,000
	[-] KPA	1	36,120,000
	[-] PPK	1	30,000,000
	[-] PPSPM	1	14,400,000

	[-] Bendahara	1	10,800,000
	[-] Bendahara Gaji	1	3,600,000
	[-] Staff PPK	2	14,400,000
	[-] Tim SAI	1	6,000,000
	[-] Lainnya	2	21,600,000
3.	4198521 Ditjen B. Islam		
a.	Pagu DIPA		4,311,834,000
b.	Pagu 521115:		57,600,000
	[-] KPA	1	19,200,000
	[-] PPK	1	12,000,000
	[-] PPSPM	1	9,600,000
	[-] Bendahara	1	4,800,000
	[-] Staff PPK	2	6,000,000
	[-] Tim SAI	2	6,000,000
4.	419853 Ditjen B. Kristen		
a.	Pagu DIPA		4,361,225,000
b.	Pagu 521115:		68,080,000
	[-] KPA	1	24,000,000
	[-] PPK	1	13,200,000
	[-] PPSPM	1	8,800,000
	[-] Bendahara	1	9,240,000
	[-] Staff PPK	1	6,840,000
	[-] Lainnya	1	6,000,000
5.	419854 Ditjen B. Katolik		
a.	Pagu DIPA		2,363,784,000
b.	Pagu 521115:		73,054,000
	[-] KPA	1	23,640,000
	[-] PPK	1	22,920,000
	[-] PPSPM	1	8,470,000
	[-] Bendahara	1	4,824,000
	[-] Staff PPK	2	12,000,000
	[-] Lainnya	1	1,200,000
6.	419855 Ditjen B. Hindu		
a.	Pagu DIPA		9,349,368,000
b.	Pagu 521115:		166,740,000
	[-] KPA	1	36,000,000
	[-] PPK	2	48,000,000
	[-] PPSPM	1	12,000,000
	[-] Bendahara	1	12,000,000
	[-] Staff PPK	2	23,040,000
	[-] Tim SAI	2	25,200,000
	[-] Lainnya	2	10,500,000
7.	419856 Ditjen B. Budha		
a.	Pagu DIPA		1,709,563,000
b.	Pagu 521115:		76,080,000
	[-] KPA	1	23,640,000
	[-] PPK	1	22,920,000
	[-] PPSPM	1	9,240,000
	[-] Bendahara	1	8,040,000
	[-] Staff PPK	1	6,000,000
	[-] Tim SAI	1	4,200,000

	[-] Lainnya	1	2,040,000
8.	419857 Ditjen B. PHU		
a.	Pagu DIPA		3,547,886,000
b.	Pagu 521115:		75,880,000
a.	[-] KPA	1	27,360,000
b.	[-] PPK	1	19,856,000
c.	[-] PPSPM	1	9,440,000
d.	[-] Bendahara	1	5,544,000
e.	[-] Staff PPK (2)	2	13,680,000
	Total Pagu Satker Kanwil Kemenag Prov. Bali (8 DIPA)	8 DIPA	54,912,472,000
	Total Pagu 521115	66 Org	819,834,000

Dari data di atas tergambar bahwa dalam satuan kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali mengalokasikan anggaran honorarium untuk KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staff PPK, SAI dan honor sejenis lainnya pada 8 DIPA dengan standar honorarium sesuai Standar Biaya Masukan yaitu besaran pagu yang dikelola di setiap DIPA.

Honor-honor tersebut pada tahun 2021, apabila dijumlahkan berdasarkan jenis honorariumnya maka honor KPA dalam setahun besarnya Rp. 226,080,000, honor PPK sebesar Rp. 203,936,000, PPSPM sebesar Rp. 86,950,000, Bendahara Pengeluaran Rp. 68,328,000, Bendahara Gaji Rp. 7,200,000, Staff PPK/ pengelola Rp. 111,120,000, Tim Sai Rp. 47,400,000 dan honorarium sejenis lainnya sebesar Rp. 68,340,000. Total Pagu Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Tahun 2021 sebesar Rp. 54,912,472,000 mengalokasikan anggaran belanja honor operasional satuan kerja (521115) sebesar Rp. 819,834,000.

Tabel 8. Anggaran Honorarium Pengelola Keuangan pada SatKer Kanwi Kemenag Prov. Bali

No	Unit/Jenis Honor	Vol	2021
1	KPA	8	226,080,000
2	PPK	10	203,936,000
3	PPSPM	8	86,950,000
4	Bendahara	8	68,328,000

5	Bendahara Gaji	2	7,200,000
6	Staff PPK	14	111,120,000
7	Tim SAI	7	47,400,000
8	Lainnya	9	68,340,000
	JUMLAH	66	819,354,000

Penulis melakukan perhitungan dengan menggunakan teknik analisis data yang telah ditentukan pada Metodologi Penelitian yaitu dengan Sistem Satu DIPA Skema-1 dan Skema 2 untuk pembayaran honor operasional satuan kerja dengan standar biaya masukan batas maksimal atau tertinggi.

Skema-1

Penulis akan membuat rancangan alokasi anggaran belanja honor operasional satuan kerja (521115) dengan Sistem Satu DIPA dan asumsi menggunakan Total Pagu untuk seluruh DIPA (8 DIPA) pada Satker Kanwil Kemenag Provinsi Bali Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 54,912,472,000. Jumlah KPA, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji diasumsikan hanya satu orang dan honor lainnya masih sama dengan skema multi DIPA, yaitu untuk PPK, Tim Sai, Staf PPK dan yang lainnya diasumsikan masih bisa muncul di unit eselon 1 dan secara peraturan SBM masih dibolehkan untuk memunculkan honor tersebut lebih dari satu orang dalam satu DIPA. Hasil rancangan diperoleh biaya untuk honor operasional satuan kerja sebesar RP. 475,595,968. Berikut rinciannya pada tabel. 9

Tabel 9. Rancangan Biaya honor operasional satuan kerja Skema-1

No	Jenis Honor	Vol.	Honor Max. SBM perbulan	Honor 1 Tahun
1	KPA	1	3,840,000	46,080,000
2	PPK	8	2,124,333	203,935,968
3	PPSPM	1	1,780,000	21,360,000
4	Bendahara	1	1,550,000	18,600,000
5	Bendahara Gaji	1	330,000	3,960,000

6	Staff PPK	8	1,226,250	117,720,000
7	Tim SAI	8	483,750	46,440,000
8	Lainnya	8	181,250	17,400,000
Total				475,495,968

Dari rancangan skema-1 sistem satu DIPA alokasi anggaran belanja operasional satuan kerja untuk kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali lebih hemat sebesar Rp. 344,238,032 dari sistem multi DIPA yang dipakai saat ini.

Skema-2

Rancangan skema-2 penulis akan lebih menghemat lagi jumlah pengelola keuangan, skema ini bisa digunakan apabila kondisi keuangan negara sedang tidak bagus. Pengelola keuangan akan diasumsikan seperti mengelola satu DIPA dalam satu satker yaitu KPA, PPSPM, Bendahara, Bendahara Gaji berjumlah masing-masing satu orang. PPK berjumlah dua orang, staff PPK empat orang dan Tim SAI berjumlah empat orang dan yang lainnya masih sama sebanyak delapan orang. Dari hasil perhitungan diperoleh biaya yang dibutuhkan hanya Rp. 252,720,000 lebih hemat dari sistem multi DIPA saat ini sebesar Rp. 567,114,000. Rincian biaya skema-2 dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Rancangan Biaya honor operasional satuan kerja Skema-1

No	Jenis Honor	Vol.	Honor Max. SBM perbulan	Honor 1 Tahun
1	KPA	1	3,840,000	46,080,000
2	PPK	2	3,320,000	79,680,000
3	PPSPM	1	1,780,000	21,360,000
4	Bendahara	1	1,550,000	18,600,000
5	Bendahara Gaji	1	330,000	3,960,000
6	Staff PPK	4	980,000	47,040,000
7	Tim SAI	4	250,000	12,000,000
8	Lainnya	8	250,000	24,000,000
Total				252,720,000

Kantor Kemenag Kab. Buleleng

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Buleleng memiliki 8 DIPA satker sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Data yang diperoleh dari informasi perencanaan Kantor Kementerian agama Kabupaten Buleleng dan data dari aplikasi satudja sama halnya dengan Kantor Wilayah Kemenag Prov Bali hampir seluruh DIPA unit Satker Kantor Kemenag Kab. Buleleng menganggarkan honorarium untuk KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staff PPK /Pengelola dan Tim SAI.

Alokasi anggaran untuk belanja operasional satuan kerja tersebut apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) pada kantor Kementerian Kabupaten Buleleng sudah mencapai 12,95% dari total anggaran yaitu total anggaran 002 sebesar Rp. 3,604,788,000 dan Anggaran operasional satuan kerja sebesar Rp. 466,806,000.

Tabel 11. Perbandingan Pagu belanja Operasional (002) dengan Belanja honor operasional satuan kerja (521115) Tahun 2021 Kab. Buleleng

No	Jenis Honor	Vol.	Honor Max. SBM perbulan	Honor 1 Tahun
1	KPA	1	3,840,000	46,080,000
2	PPK	2	3,320,000	79,680,000
3	PPSPM	1	1,780,000	21,360,000
4	Bendahara	1	1,550,000	18,600,000
5	Bendahara Gaji	1	330,000	3,960,000
6	Staff PPK	4	980,000	47,040,000
7	Tim SAI	4	250,000	12,000,000
8	Lainnya	8	250,000	24,000,000
Total				252,720,000

Detail peruntukan anggaran belanja operasional satuan kerja tiap unit eselon1 pada satuan kerja Kantor Kemenag Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Anggaran Belanja Operasional Satuan Kerja Kantor Kemenag Kab. Buleleng

No	Unit/Jenis Honor	2021
1.	419875 Sekretariat Jenderal	
a.	Pagu DIPA	2,777,695,000
b.	Pagu 521115:	58,200,000
	[-] KPA	12,000,000
	[-] PPK	10,800,000
	[-] PPSPM	8,400,000
	[-] Bendahara	7,200,000
	[-] Staff PPK	10,800,000
	[-] Tim SAI	1,200,000
	[-] Lainnya	7,800,000
2.	419878 Ditjen B. Islam	
a.	Pagu DIPA	3,136,759,000
b.	Pagu 521115:	25,200,000
	[-] KPA	6,000,000
	[-] PPK	4,800,000
	[-] PPSPM	4,200,000
	[-] Bendahara	4,200,000
	[-] Staff PPK	3,600,000
	[-] Tim SAI	2,400,000
3.	419879 Ditjen Pendidikan Islam	
a.	Pagu DIPA	25,319,830,000
b.	Pagu 521115:	135,000,000
	[-] KPA	40,800,000
	[-] PPK	31,200,000
	[-] PPSPM	18,000,000
	[-] Bendahara	15,600,000
	[-] Staff PPK	10,800,000
	[-] Tim SAI	10,800,000
	[-] Lainnya	7,800,000
4.	419880 Ditjen B. Kristen	
a.	Pagu DIPA	215,889,000
b.	Pagu 521115:	19,800,000
	[-] KPA	4,800,000
	[-] PPK	4,200,000
	[-] PPSPM	3,600,000
	[-] Bendahara	3,000,000
	[-] Lainnya	10,200,000
5.	419882 Ditjen B. Katolik	
a.	Pagu DIPA	333,691,000
b.	Pagu 521115:	10,200,000
	[-] KPA	2,400,000
	[-] PPK	2,100,000
	[-] PPSPM	1,800,000
	[-] Bendahara	1,500,000
	[-] Bendahara Gaji	1,200,000
	[-] Lainnya	1,200,000
6.	419883 Ditjen B. Hindu	
a.	Pagu DIPA	36,673,261,000
b.	Pagu 521115:	136,800,000
	[-] KPA	40,800,000
	[-] PPK	31,200,000
	[-] PPSPM	18,000,000
	[-] Bendahara	15,600,000
	[-] Bendahara Gaji	10,800,000
	[-] Staff PPK	12,600,000
	[-] Tim SAI	7,800,000
7.	419884 Ditjen B. Budha	
a.	Pagu DIPA	1,334,000,000
b.	Pagu 521115:	40,800,000
	[-] KPA	12,000,000
	[-] PPK	10,800,000
	[-] PPSPM	6,000,000
	[-] Bendahara	5,400,000
	[-] Bendahara Gaji	3,600,000
	[-] Staff PPK	3,000,000
	[-] Tim SAI	
8.	419885 Ditjen PHU	
a.	Pagu DIPA	539,086,000
b.	Pagu 521115:	40,806,000
	[-] KPA	10,200,000
	[-] PPK	9,000,000
	[-] PPSPM	7,200,000
	[-] Bendahara	6,000,000
	[-] Staff PPK	4,206,000
	[-] Tim SAI	4,200,000
Total Pagu Satker Kantor Kemenag Kab. Buleleng (8DIPA)		70,330,211,000

Satuan kerja Kantor Kemenag Kabupatana Buleleng megalokasikan anggaran honorarium untuk KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staff PPK, SAI dan honor sejenis lainnya sama dengan Kantor Wilayah Provinsi Bali ada pada 8 DIPA dengan standar besaran sesuai pagu yang dikelola di setiap DIPA.

Honor-honor tersebut apabila jumlahkan berdasarkan jenis horariumnya maka honor KPA dalam setahun besarnya Rp. 129,000,000, honor PPK sebesar Rp. 104,100,000, PPSPM sebesar Rp. 67,200,000, Bendahara Pengeluaran Rp. 58,500,000, Bendahara Gaji Rp. 15,600,000, Staff PPK/ pengelola Rp. 45,006,000, Tim Sai Rp. 26,400,000 dan

honorarium sejenis lainnya sebesar Rp. 21,000,000.

Tabel 13. Anggaran Honorarium Pengelola Keuangan pada SatKer Kantor Kemenag Kab. Buleleng

No	Unit/Jenis Honor	2021	2022
1	KPA	129,000,000	109,200,000
2	PPK	104,100,000	85,500,000
3	PPSPM	67,200,000	59,400,000
4	Bendahara	58,500,000	50,700,000
5	Bendahara Gaji	15,600,000	15,000,000
6	Staff PPK	45,006,000	36,610,000
7	Tim SAI	26,400,000	25,800,000
8	Lainnya	21,000,000	21,600,000
JUMLAH		466,806,000	403,810,000

Skema-1

Hasil rancangan biaya belanja honor operasional satuan kerja satker Kabupaten Buleleng dengan menggunakan skema-1 diperoleh jumlah biaya sebesar Rp. 338,046,000 lebih hemat dari sistem multi DIPA saat ini sebesar Rp. 128,760,000. Berikut rincian perhitungan skema-1 pada tabel 14.

Tabel 14. Rancangan Biaya honor operasional satuan kerja Skema-1 Kantor Kemenag Kab. Buleleng

No	Jenis Honor	Vol.	Honor Max. SBM perbulan	Honor 1 Tahun
1	KPA	1	3,840,000	46,080,000
2	PPK	8	1,084,375	104,100,000
3	PPSPM	1	1,780,000	21,360,000
4	Bendahara	1	4,875,000	58,500,000
5	Staff PPK	8	468,813	45,006,000
6	Tim SAI	8	412,500	39,600,000
7	Lainnya	8	243,750	23,400,000
Total				338,046,000

Skema-2

Hasil rancangan biaya belanja honor operasional satuan kerja satker Kabupaten Buleleng dengan menggunakan skema-2 diperoleh jumlah biaya sebesar Rp. 217,668,000 lebih hemat dari sistem multi DIPA saat ini sebesar Rp. 249,138,000.

Berikut rincian perhitungan skema-1 pada tabel. 15

Tabel 15. Rancangan Biaya honor operasional satuan kerja Skema-2 Kantor Kemenag Kab. Buleleng

No	Jenis Honor	Vol.	Honor Max. SBM perbulan	Honor 1 Tahun
1	KPA	1	3,840,000	46,080,000
2	PPK	2	1,084,375	26,025,000
3	PPSPM	1	1,780,000	21,360,000
4	Bendahara	1	4,875,000	58,500,000
6	Staff PPK	4	468,813	22,503,000
7	Tim SAI	4	412,500	19,800,000
8	Lainnya	8	243,750	23,400,000
Total				217,668,000

Hasil penelitian, satker Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Bali menunjukkan hasil yang hampir sama terdapat penghematan biaya operasional satuan kerja bila menggunakan skema-1 berkisar antara Rp. 110,000,000 sampai dengan Rp. 130,000,000 dan bila menggunakan Skema-2 bisa menghemat sekitar Rp. 200,000,000 sampai dengan Rp. 230,000,000

Hasil Penghematan

Hasil perbandingan Sistem Multi DIPA saat ini dengan sistem Satu DIPA/*Single DIPA* menggunakan dua skema untuk pengalokasian anggaran belanja honor operasional satuan kerja pada Satker Kanwil Kemenag Provinsi Bali dan Kantor Kemenag Kab. Buleleng ditemukan bahwa anggaran dengan multi DIPA saat ini jauh lebih besar biayanya dibandingkan apabila menggunakan sistem satu DIPA. Di Kanwil Bali terdapat selisih lebih hemat anggaran untuk belanja operasional satuan kerja dengan skema-1 sebesar Rp. 344,238,032 anggaran yang dibutuhkan hanya sebesar Rp. 475,595,968. dan skema-2 lebih hemat sebesar Rp. 567,114,000 anggaran yang dibutuhkan hanya Rp. 252,720,000.

Apabila kebutuhan anggaran yang dipakai sample skema-1 dari Kanwil Prov. Bali di mana satu kanwil bisa menghemat rata-rata belanja honor operasional satuan kerja sebesar Rp. Rp. 344,238,032 dikalikan 34 Provinsi maka anggaran yang bisa dihemat seluruh Kanwil Kementerian Agama adalah sebesar Rp. 11,704,093,088. Dibandingkan dengan alokasi saat ini seperti pada tabel. Dengan Skema-2 penghematan sebesar Rp567,114,000 dalam satu kanwil dikalikan 34 Provinsi maka diperoleh penghematan belanja operasional untuk tingkat kanwil seluruh indonesia sebesar Rp. 19,818,876,000.

Tabel 16. Hasil Penghematan tingkat Kantor Wilayah

No	Sistem satu DIPA	Hemat 1 Kanwil	Hemat 34 Kanwil
1	Skema-1	344,238,032	11,704,093,088
2	Skema-2	567,114,000	19,818,876,000

Tingkat Kabupaten dengan sample Kantor Kemenag Kab. Buleleng terdapat penghematan dengan menggunakan skema-1 sebesar Rp. 128,760,000 dan skema-2 sebesar Rp. 249,138,000. Apabila di kalikan jumlah penghematan tersebut dengan seluruh satker Kabupaten/Kota Kementerian Agama yang berjumlah sebanyak 514 satker maka penghematan yang diperoleh dari seluruh satker Kab/Kota tersebut adalah sebesar Rp. 66,182,640,000 untuk skema-1 dan Rp. 128,056,932,000 untuk skema-2

Tabel 17. Hasil Penghematan tingkat Kantor Kabupaten/Kota

No	Sistem Satu DIPA	Hemat 1 Kab/ Kota	Hemat 514 Kab/ Kota
1	Skema-1	128,760,000	66,182,640,000
2	Skema-2	249,138,000	128,056,932,000

Pembahasan

Anggaran Belanja Operasional dan pemeliharaan perkantoran (002)

diperuntukan untuk membiayai kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satker dalam rangka operasional kantor dan pemeliharaan aset-aset tetap perkantoran yang sudah ada agar selalu dalam kondisi normal. Selain itu Belanja Operasional dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelayanan publik, yaitu kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output dalam rangka pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi masing-masing satker.

Pada DIPA Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 Alokasi Anggaran untuk Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) sebesar Rp. 2,985,130,870,740, alokasi yang terbesar diatas 10% adalah untuk belanja keperluan perkantoran (521111) sebanyak 1,047,985,004,000 atau 35,1%, kemudian belanja honor operasional satuan kerja (521115) sebanyak 379,958,183,000 atau 12,7% , belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebanyak 310,960,358,000 atau 10,4% dan belanja perjalanan dinas biasa (524111) sebesar Rp. 306,215,729,000 atau 10,2%.

Tabel 18. Alokasi belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) Kementerian Agama Tahun 2021 berdasarkan Akun

Akun	Uraian	Jumlah	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,047,985,004,000	35.11%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	379,958,183,000	12.73%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	310,960,358,000	10.42%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	306,215,729,000	10.26%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	193,250,627,000	6.47%
522111	Belanja Langganan Listrik	163,222,654,000	5.47%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	128,571,341,000	4.31%
522141	Belanja Sewa	125,093,062,000	4.19%
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	47,187,929,000	1.58%

521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	44,785,944,000	1.50%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,389,218,000	1.25%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	32,439,631,000	1.09%
521211	Belanja Bahan	29,567,004,000	0.99%
522112	Belanja Langganan Telepon	23,005,537,000	0.77%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	22,208,832,000	0.74%
522113	Belanja Langganan Air	18,307,888,000	0.61%
522191	Belanja Jasa Lainnya	16,909,582,000	0.57%
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,916,602,000	0.23%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	6,141,152,000	0.21%
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,174,861,000	0.17%
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	4,938,118,740	0.17%
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,425,482,000	0.15%
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,049,842,000	0.14%
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	3,769,438,000	0.13%
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3,666,200,000	0.12%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,419,874,000	0.08%
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2,023,009,000	0.07%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,922,138,000	0.06%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,918,644,000	0.06%
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,914,369,000	0.06%
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	1,701,896,000	0.06%
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1,595,920,000	0.05%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,038,088,000	0.04%
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,029,246,000	0.03%

52xxxx	20 Akun lainnya dibawah 1,000,000,000	3,427,468,000	0.11%
Total		2,985,130,870,740	100%

Dari keempat jenis belanja operasional yang alokasinya terbesar tersebut diatas dilakukan identifikasi penyebab besarnya alokasi anggaran dan kemungkinan dilakukan efisiensi. hasil telaah dokumen dari RKA-K/L satker dapat diketahui peruntukan keempat jenis belanja yang terbesar tersebut antara lain:

1. Belanja Keperluan Perkantoran (521111)
Belanja keperluan perkantoran digunakan untuk konsumsi rapat, jamuan tamu, langganan air minum, langganan koran, pembayaran PBB Kantor dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
2. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (521115)
Belanja honor operasional satuan kerja (521115) terdiri dari honorarium pejabat pengelola keuangan dan perbendaharaan seperti honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (BPABP), Operator SAI, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dan honor-honor sejenis lainnya.
3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)
Alokasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan adalah biaya yang wajib disediakan untuk merawat kualitas dan menjaga mutu bangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 7/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan serta Pengalokasian anggaran pemeliharaan gedung disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan.

4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) Belanja perjalanan dinas yang ada di operasional adalah belanja perjalan dinas pimpinan terkait tugas dan fungsinya serta koordinasi dengan instansi terkait.

Potensi untuk dilakukan efisiensi pada konsumsi rapat yang bisa dihemat dengan mengurangi anggarannya tetapi akan berdampak pada kualitas dan kuantitas rapat, demikian juga dengan perjalanan dinas apabila dihemat akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan, belanja pemeliharaan gedung tidak mungkin dihemat karena pengalokasinya sudah pasti memakai standar biaya masukan, belanja yang paling relevan untuk dilakukan efisiensi sesuai dengan tujuan penulisan adalah belanja operasional satuan Kerja (521115) dengan penerapan sistem satu DIPA pada satker Kanwil dan Kankemenag Kab/Kota.

Dari data yang DIPaparkan pada hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa anggaran belanja honor operasional satuan kerja (521115) pada Kementerian Agama jumlahnya sudah cukup besar yaitu sebesar Rp. 379,779,553,000 atau 12,1 % dari Total anggaran belanja operasional Kementerian Agama disebabkan oleh alokasi anggaran untuk honorarium pengelola keuangan dan perbendaharaan pada satker Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota yang menggunakan sistem multi DIPA.

Sistem Multi DIPA tidak sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja yang menekankan konsep Value for money yaitu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Mardiasmo (dalam erawan dkk, 2018:8)

Ekonomis merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Perencanaan anggaran sangatlah penting dan besar manfaatnya bagi suatu organisasi menurut Nordiawan (dalam Saputra & Mesiono, 2021:1) salah satu fungsi anggaran adalah penganggaran merupakan alat perencanaan, melalui fungsi tersebut organisasi atau lembaga mengetahui apa yang perlu dilaksanakan serta mengarah kemana merumuskan kebijakan. Perencanaan menjadi acuan bagi organisasi atau lembaga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuannya, sehingga dapat mencapai tujuannya sesuai prinsip efisiensi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, mengatur sistem pendekatan yang

dipakai dalam penganggaran adalah penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Salah satu prinsip pelaksanaan Anggaran Belanja/Pengeluaran Negara adalah Hemat tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Anggara (2016)

Alokasi Anggaran belanja honor operasional satuan kerja pada satker Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota belum memakai prinsip ekonomis dan efisien karena masih memakai satuan biaya yang tertinggi dan jumlah personil pengelola keuangan secara maksimal berdasarka jumlah DIPA. Ketidak ekonomisan dan efiesiesi ini bisa dihindari apabila dalam satu satker baik Kantor Wilayah maupun Kantor Kabupaten/Kota menggunakan satu DIPA dimana didalam Satu DIPA tersebut tetap berisikan informasi kinerja dari unit-unit eselon 1 . Penurunan akan terlihat pada honorarium sejenis yang diterima oleh satu orang seperti honor KPA yang biasa diterima oleh kepala satker dan PPSPM yang bisaya diterima oleh Kabag TU/Kasubbag TU. Honor lainnya yang bisa diefisienkan lagi yaitu honor bendahara dan Bendaharan Gaji cukup menggunakan masing-masing satu orang.

Secara Nasional penghematan yang dapat dilakukan apabila menggunakan satu DIPA dari seluruh satker Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota dengan menggunakan skema-1 sebesar Rp. 77,886,733,088 dan skema-2 sebesar Rp. 147,875,808,000. Potensi penghematan yang cukup besar tersebut bisa alihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas lainnya di Kementerian Agama.

Sistem multi DIPA membuat tidak efisien dari sisi pengalokasian anggaran belanja

operasional satuan kerja, satu orang bisa menerima honor lebih dari satu DIPA walaupun secara peraturan dibolehkan. Kekurangan sistem multi DIPA lainnya adalah dimana sulitnya saat satker Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota untuk melakukan revisi antar unit eselon-1 dalam program yang sama, satker juga kesulitan untuk menanggulangi kekurangan pagu belanja pegawai padahal ada DIPA satker yang lebih dan ada DIPA satker yang kurang seharusnya dengan sistem satu DIPA dapat diselesaikan dengan mudah karena satu Program dan peruntukan yang sama.

Alternatif Kebijakan Rancangan Sistem Satu DIPA

Penerapan Sistem Satu DIPA pada satker kanwil dan Kabupaten/Kota akan membuat pengalokasiaan anggaran honor-honor pengelola keuangan mengalami perubahan, Dalam Rancangan Sistem Satu DIPA ini dilakukan penggabungan belanja operasional baik belanja pegawai (001) maupun belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran (002). Dengan demikian otomatis biaya operasional satuan kerja akan menjadi satu tempat, sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan honor KPA, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran dibayarkan honoranya dari satu DIPA atau beberapa DIPA. Apabila jumlah DIPA hanya satu dalam satu Satker maka otomatis pengalokasian anggaranya akan menjadi satu. Pada Peraturan Menteri Agama No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama bahwa jumlah KPA, PPSM dan Bendahara Pengeluaran

dalam satu Satker ditetapkan masing-masing 1(satu) orang sedangkan PPK dan SPK bisa lebih dari satu orang.

Penulis memberi dua model Rancangan Sistem Satu DIPA untuk Satker Kantor Wilayah dan Kantor Kabupaten/Kota dengan nama Model-1 dan Model-2. Berikut Rancangan Sistem Satu DIPA dengan Rancangan Model-1 dan Model-2:

1. Alternatif Model-1

Dalam Rancangan Model-1 ini struktur dalam Satu DIPA Satker Kanwil/ Kabupaten/ Kota terdapat unit-unit eselon 1 dengan kode eselon 1 masing-masing, kemudian dibawah unit eselon 1 terdapat program, Kegiatan, KRO, RO, komponen, subkomponen dan alokasi anggarannya. Dibawah unit eselon 1 bisa berisikan lebih dari satu program dan kegiatan, sehingga mempermudah dalam rincian karena runut dalam halaman berturut-turut tidak tersebar.

Tabel 19. Struktur DIPA pada Sistem Satu DIPA Model-1

Satu DIPA Kantor Wilayah/Kab/Kota	
[-] Program 1	
[-] Kegiatan (01) Sekjen	
[-] KRO/RO/Komponen	
[-] Kegiatan (03) Bimas Islam	
[-] KRO/RO/Komponen	
[-] Kegiatan (04) Pendis	
[-] KRO/RO/Komponen	
[-] Kegiatan (05) Kristen	
[-] KRO/RO/Komponen	
[-] Kegiatan (06) Katolik	
[-] KRO/RO/Komponen	
[-] Kegiatan (07) Hindu	
[-] KRO/RO/Komponen	
[-] Kegiatan (08) Budha	
[-] KRO/RO/Komponen	
[-] Kegiatan (09) PHU	
[-] KRO/RO/Komponen	
[-] Program 2	
[-] Kegiatan (01) Sekjen	
[-] KRO/RO/Komponen	

[-] Kegiatan (03) Bimas Islam
[-] KRO/RO/Komponen
[-] Kegiatan (04) Pendis
[-] KRO/RO/Komponen
[-] Kegiatan (05) Kristen
[-] KRO/RO/Komponen
[-] Kegiatan (06) Katolik
[-] KRO/RO/Komponen
[-] Kegiatan (07) Hindu
[-] KRO/RO/Komponen
[-] Kegiatan (08) Budha
[-] KRO/RO/Komponen
[-] Kegiatan (09) PHU
[-] KRO/RO/Komponen
[-] Program 3
[-] Program 4
... Dst.

Kelebihan Sistem Satu DIPA

Dari hasil penelitian dan pembahasan Sistem Satu DIPA apabila diterapkan pada Satker Kantor Wilayah dan Kabupaten/ Kota mempunyai kelebihan dibandingkan Sistem Multi DIPA yang dipakai saat ini sebagai berikut:

1. Sistem Satu DIPA/single DIPA membuat jumlah DIPA pada Kementerian Agama menjadi lebih sedikit sehingga menyebabkan alokasi belanja operasional satuan kerja untuk honor-honor pengelola keuangan dan perbendaharaan menjadi lebih efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip penganggagaran berbasis kinerja yang menekankan konsep Value for money yaitu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Mardiasmo (Harindra, 2009:4). Hal ini juga merupakan arah dari Presiden Joko Widodo dalam kabinetnya yang mengimbau seluruh menteri kabinet untuk menggunakan anggaran

belanjanya sesuai dengan program prioritas. Kusuma (dalam pranasari, 2016:6).

2. Mempermudah dalam melakukan revisi anggaran antar unit eselon 1 selama pergeseran anggaran dalam satu Program dan peruntukan yang sama khususnya yang sering terjadi dalam rangka penyelesaian kekurangan belanja pegawai dan pagu minus di akhir tahun.
3. Administrasi pengelolaan dan pelaksanaan anggaran secara terpadu menjadi satu pintu sehingga mempermudah dalam pertanggungjawaban laporan keuangan.

Kekurangan Sistem Satu DIPA

Kekurangan dari Sistem Satu DIPA apabila diterapkan pada Satker Kantor Wilayah dan Kabupaten/Kota adalah:

1. Pejabat pengelola keuangan akan berkurang honorinya dari system multi DIPA.
2. Beban kerja pejabat pengelola keuangan yang disatukan DIPAny akan lebih berat tanggungjawabnya.
3. Koordinasi unit teknis dengan pengelola keuangan lebih susah.
4. Ego sectoral pengelola keuangan akan lebih meningkat.

Kekurangan dari sistem satu DIPA ini sebagian besar hanya faktor SDM maka perlu kedepan pengawasan dan peningkatan kinerja SDM Pengelola keuangan pada satuan kerja.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Sistem Multi DIPA yang dipakai saat ini pada Satker Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota membuat alokasi anggaran belanja operasional satuan kerja tidak efisien. Anggaran untuk operasional menjadi lebih besar khususnya honor operasional satuan kerja (521115) untuk honorarium pengelola keuangan dan pejabat perbendaharaan. Sistem Multi DIPA juga menjadikan jumlah satker Kementerian Agama terlalu banyak sehingga kesulitan pada administrasi mulai dari penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Sistem Multi DIPA tidak sesuai dengan prinsip penganggagan berbasis kinerja yang menekankan konsep Value for money yaitu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Rekomendasi

Sistem Multi DIPA pada Satker Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih dipakai sampai saat ini sebaiknya di lakukan perubahan menjadi Sistem Satu DIPA/Single DIPA dimana didalam satu DIPA berisikan program dan kegiatan dari eselon 1 yang berbeda-beda.

Pengusulan Sistem Satu DIPA dapat dimulai melalui usulan dari Kementerian

Agama kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Selanjutnya dilakukan Pertemuan tiga pihak secara intensif untuk membahas dan menyepakati usulan Kementerian Agama tersebut.

Penulis sebagai pelaku penyusunan Informasi kinerja pada Program di Kementerian Agama khususnya Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu merekomendasikan alternatif model-1 agar masing-masing pengelola anggaran unit eselon 1 lebih mudah memahami struktur anggarannya walaupun sudah tergabung dalam satu DIPA.

Perlu lebih lanjut ada kajian khusus untuk sistem Satu DIPA Kementerian Agama khususnya untuk satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Kabupaten/Kota yang sampai saat ini masih menggunakan sistem Multi DIPA.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr.

REFERENSI

Buku:

Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.

Mahmudi, M. (2019). "Manajemen Kinerja Sektor Publik". Dalam, *Akademi Manajemen Perusahaan YKPN*, Yogyakarta (3rd Ed., Vol. 1). Yogyakarta: UPP STIM YKPIN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Sugiono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Adha, K. N., Febrianto, K. M., Mahfudin & Lestari, N. A. (2018). "Efisiensi Belanja Operasional Kementerian/Lembaga". Dalam, *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI*, 2(2). <https://doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss2.art37>

Drs. H. Agus Sunaryo, M.Si selaku Ketua Umum Kelompok Kerja Nasional Perencana Kementerian Agama yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan artikel ini.

2. Ibu Wayan Puji Astuti, SH, M.Si selaku Plt. Sekretaris Ditjen Bimas Hindu yang selalu memberi masukan dan ide-ide inovatif.
3. Ibu Ida Nurqosim, Bapak M Iqbal, Bapak Najiboruhman, para Koordinator Perencanaan di Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang senantiasa memberi dukungan dan koreksi-koreksi yang bermamfaat.
4. Bapak Bagus Drana Arimbawa, Bayu Andika, Niluh Sri Yulianti, selaku koordinator dan Sub koordinator perencanaan serta Segenap jajaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan dalam penyelesaian Artikel.

- Erawan, P. A., Santosa, M. S. W. A., Budhiarta, D. K. B. & Wahyudi, I. P. (2018). “Peranan *Value For Money* untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng, 13(8)”. Dalam, *Retrieved* from: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/20010/11982>
- Harindra, I., (2019). “Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Perspektif *Value For Money*, 8(2)”. Dalam, *Retrieved* from :<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/246>
- Lestari, S. E., Suryono, A., & Domai, T. (2018). “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Pacitan”. Dalam, *Journal of Public Sector Innovations*, 2(1), 10–16. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p10-16>
- Pranasari, B. A. & Fitri, S. E. (2020). “*The Implementation of Restructuring Program and Activities Based on the Money Follow Program in Regions*”. Dalam, *Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(2), 163-177. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v6i2.447>
- Saputra, I.B. & Mesiono, (2021). “Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPB) Pendidikan”, 1(9), 1865-1870. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i9.362>
- Trisugiarto, T. (2016). “Efektifitas Sistem Informasi Penganggaran Terhadap Pencapaian Kinerja”, 15(1),16-24. <https://doi.org/10.19184/jeam.v15i1.1900>

Peraturan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5115>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/ofcc8a10-3466-4989-b7d6-39eea9f61f86>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK/02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a73998d2-c308-4451-a907-35438a028e80/60~PMK.02~2021Per.pdf>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. <https://kemenag.go.id/archive/peraturan-menteri-agama-nomor-19-tahun-2019-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-instansi-vertikal-kementerian-agama>.